



**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF DAN PENGAWASAN
TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

TESIS

Oleh

**Mikaila Khalisha Dadiarto
200820301008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2024**



**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF DAN PENGAWASAN TERHADAP
KUALITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister pada
program studi Magister Akuntansi.*

TESIS

Oleh

**Mikaila Khalisha Dadiarto
200820301008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas terselesaikannya penyusunan tesis ini. Penulis dengan rasa bangga mempersembahkannya, untuk:

1. Bapak dan mama tersayang atas do'a dan cintanya yang tak terbatas;
2. Kakak dan adik-adik tersayang atas segala harapan dan perhatiannya;
3. Kerabat terdekat atas pantauan dan bimbingannya selama riset berlangsung;
4. Pimpinan dan rekan kerja atas dukungannya yang tulus sepanjang penulisan;
5. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu atas seluruh kalimat motivasinya sepanjang masa studi;
6. Pihak-pihak lainnya yang menjadi semangat dan motivasi menyelesaikan riset ini dengan sebaik-baiknya;
7. Segenap *civitas* akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Almamater tercinta Universitas Jember.

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)

“Ikatlah (catatlah) ilmu dengan tulisan.” (HR. Ibnu ‘Abdil Barr)

“Ilmu itu ibarat binatang buruan, dan tulisan adalah tali yang mengikat binatang buruan tersebut. Maka ikatlah buruan-buruan dengan tali yang kokoh dan kuat.”
(Para Ulama)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mikaila Khalisha Dadiarto

NIM : 200820301008

Jurusan/Prodi : Akuntansi / Magister Akuntansi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Norma Subjektif dan Pengawasan Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Situbondo” ialah benar – benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumber-nya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung setinggi – tingginya.

Demikian pernyataan ini saya buat, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya juga bersedia menerima sanksi akademik, jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juni 2024

Yang menyatakan,

Mikaila Khalisha Dadiarto

NIM. 200820301008

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis berjudul *Pengaruh Norma Subjektif dan Pengawasan Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 03 juni 2024

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP : 19780927 200112 1 002

(.....)

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

NIP : 19670102 199203 2 002

(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Prof. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak.

NIP : 19720416 200112 1 001

(.....)

2. Penguji Anggota 1

Nama : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak

NIP : 19640809 199003 2 001

(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Norma Subjektif dan Pengawasan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan data primer, yakni kuisisioner yang dikumpulkan dari petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang aktif dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa di Kabupaten Situbondo berjumlah 84 responden. Jumlah sampel sebanyak 84 petugas pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo terpilih dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Metode analisis data yang digunakan, yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Norma Subjektif terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik Norma Subjektif pun akan meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Pengawasan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik Pengawasan akan meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Norma Subjektif, Pengawasan, Kualitas Pajak Bumi dan Bangunan

RINGKASAN

Capaian realisasi penerimaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo tahun 2019 – 2022 berada diatas 100 persen, namun tahun 2023 tingkat pencapaian penerimaan ini mengalami penurunan menjadi 83,80 persen atau di bawah 100 persen. Keadaan ini menunjukkan sebuah persoalan yang menyebabkan realisasi penerimaan pendapatan PBBP2 di tahun tersebut tidak mencapai 100 persen. Menurut Plt. Badan Pendapatan Daerah Situbondo, Edy Wiyono (2023) ketidaktercapaian ini disebabkan oleh faktor ekonomi Wajib Pajak itu sendiri. Penyebab lain, Inspektorat (2023) mengungkapkan, “target PBBP2 tidak dapat 100 persen terealisasi dikarenakan petugas pemungut pajak (perangkat desa) tidak menyetorkan kembali uang pajak yang sudah dipungut dari Wajib Pajak ke daerah”. Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Pada kegiatan monitoring tersebut disimpulkan adanya indikasi penyalahgunaan pajak PBBP2 oleh oknum petugas pemungut pajak untuk berbagai alasan, seperti keuntungan pribadi, tekanan lingkungan kerja atau bahkan ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang dirasakan oleh oknum terhadap pimpinan di tempat kerja. Fraud level bawah (pegawai) lumrah terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara finansial maupun non – finansial. *Association of Certified Fraud Examiners* atau ACFE (2019) menyebutkan fraud yang dilakukan oleh karyawan persentasenya menyentuh angka 38%. Hal ini logis terjadi disebabkan karyawan merupakan jabatan terendah dalam struktur organisasi yang benar – benar rentan memperoleh tekanan pribadi maupun dari organisasi yang dapat mengganggu psikologis individu tersebut serta berimplikasi terhadap perilaku (niat) dari seseorang melakukan *fraud* bila terdapat peluang (Herman dan Ramadhea, 2021). Pengawasan efektif seharusnya memberikan tindakan korektif nyata supaya kualitas pengelolaan membaik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih *detail* guna mengetahui pengaruh norma subjektif serta pengawasan terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan tergolong dalam

penelitian *policy research*. Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu data primer (kuesioner yang disebarakan secara online, melalui *google form* ke responden) dan data sekunder (jurnal, buku, maupun artikel internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti). Teknik analisis data yang dipergunakan adalah regresi linier berganda dibantu dengan aplikasi *Statistical Program for Social Science* atau SPSS (version 22). Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 (Uji t) dengan nilai signifikansinya sebesar 0,001. Variabel lainnya yaitu Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 (Uji t) dengan nilai signifikansinya senilai 0,000. Oleh sebab itu, hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini diterima. Kesimpulan dari penelitian ini, adalah Norma Subjektif dan Pengawasan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat rahmat beserta kasih sayangnya, sehingga penulis diberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Norma Subjektif dan Pengawasan Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pasca sarjana dan memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Jember.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang besar dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak dan mama tersayang atas do'a dan cintanya yang tak terbatas;
2. Kakak dan adik-adik tersayang atas segala harapan dan perhatiannya;
3. Dosen Pembimbing dan Penguji yang sangat luar biasa menyemangati;
4. Kerabat terdekat atas pantauan dan bimbingannya selama riset berlangsung;
5. Pimpinan dan rekan kerja atas dukungannya yang tulus sepanjang penulisan;
6. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu atas seluruh kalimat motivasinya sepanjang masa studi;
7. Pihak-pihak lainnya yang menjadi semangat dan motivasi menyelesaikan riset ini dengan sebaik-baiknya;
8. Segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
9. Almamater tercinta Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu besar harapan penulis untuk diberikan saran serta masukan yang membangun supaya tesis ini lebih memberikan manfaat dan pandangan yang realistis bagi seluruh pembacanya.

Jember, 03 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran	17
2.4 Perumusan Hipotesis	19
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Jenis dan Sumber Data	21
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	22
3.4 Definisi Operasional Variabel	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	26

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum	31
4.2 Analisis Data	32
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Implikasi Penelitian	43
5.3 Keterbatasan Penelitian	44
5.4 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2022	2
Tabel 2. Realisasi PBBP2 Tahun 2019 - 2023.....	3
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4. Skala Likert.....	22
Tabel 5. Operasional Variabel Dependen dan Independen.....	24
Tabel 6. Karakteristik Responden.....	32
Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 8. Hasil Uji Validitas	34
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas.....	35
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas	36
Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas	37
Tabel 12. Hasil Uji Glejser	37
Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
Tabel 14. Hasil Uji t.....	39
Tabel 15. Hasil Uji F.....	40
Tabel 16. Hasil Uji R ²	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	18
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner	50
Lampiran 2 Rekapitulasi Kuisisioner	53
Lampiran 3 Statistik Deskriptif.....	56
Lampiran 4 Uji Instrumen.....	57
Lampiran 5 Analisis Regresi Linier Berganda	61
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik	62
Lampiran 7 Uji Hipotesis.....	64
Lampiran 8 R_{tabel}	65
Lampiran 9 Rekap Kuisisioner	66

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era ini akuntansi sektor publik terus berkembang utamanya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan, dimana pemerintah daerah didorong bersaing secara sehat dalam meningkatkan Pembiayaan Asli Daerah agar pemerintah daerah bersangkutan dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerahnya sendiri dengan mencermati prinsip daerah otonom berlaku. Pemerintah daerah saat ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menggali potensi sumber – sumber pembiayaan yang potensial dan ketika diperoleh pun harus dikelola secara tertib, taat pada perundang – undangan, efektif, efisien serta ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mencermati asas keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat (Agustin dan Dwiningwarni, 2023).

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan biaya cukup besar, namun hal ini sebanding dengan dampak positif yang ditimbulkan. Implementasi otonomi daerah perlu didukung, meski pembiayaan yang dibutuhkan sangat besar. Namun, hingga sekarang sumber pembiayaan asli dari daerah belum bisa diandalkan. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu berupaya menggali peluang sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. PAD merupakan bekal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sekaligus mencerminkan kapabilitas daerah sepanjang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan (Hafizrianda *et al.*, 2019). Salah satu instrumen pendapatan yang berperan besar terhadap kesuksesan pembangunan daerah ialah penerimaan di sektor pajak, oleh karena itu Pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan sekian daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah di Provinsi Jawa Timur yang telah berusaha mengamalkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan melalui pendayagunaan seluruh potensi sumber daya non - manusia

maupun sumber daya manusia yang tersedia. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah daerah yaitu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkala dan meninjau efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan realisasi target pendapatan daerah di sektor pajak dalam beberapa tahun kebelakang yang sudah sangat optimal bahkan melebihi dari target realisasi yang ditetapkan, meskipun pada akhirnya mengalami penurunan di tahun 2023. Lebih jelas, data tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 yang sudah dihimpun dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Situbondo Periode 2019 – 2022, dibawah ini:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
2019	43.479.545.300,53	53.364.172.516,00	122,73
2020	35.299.531.977,00	42.657.767.499,00	120,85
2021	42.540.349.415,00	45.896.491.659,00	107,89
2022	55.681.740.297,00	57.647.054.732,00	103,53
2023	66.991.996.583,00	59.963.461.725,00	89,51

Sumber: Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2019 – 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa capaian realisasi PAD di Kabupaten Situbondo selama tahun 2019 – 2022, selalu berada di atas 100 persen. Meskipun pada tahun 2023 capaian realisasinya turun menjadi 89,5 persen, namun jika dilihat dari segi nilai, jumlah realisasi setiap tahun terus mengalami kenaikan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target di tahun 2023, yakni kurang optimalnya penerimaan pendapatan di sektor pajak salah satunya PBBP2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah yang memiliki peranan penting, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Pajak daerah ini dikenakan atas kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan bumi dan/atau bangunan (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009). PBBP2 memegang keterlibatan besar nomor tiga didalam struktur PAD Kabupaten Situbondo. Berikut, capaian realisasi target PBBP2 yang bisa dilihat dalam Tabel 1.2 bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Situbondo Periode 2019 – 2023, pada tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi PBBP2 Tahun 2019 - 2023

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
2019	4.500.000.000,00	5.027.891.886,00	111,73
2020	4.500.000.000,00	4.982.877.715,00	110,73
2021	5.000.000.000,00	5.885.657.785,00	101,77
2022	6.000.000.000,00	6.664.116.699,00	111,07
2023	10.000.000.000,00	8.379.778.995,00	83,80

Sumber: Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2019 – 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui jika capaian realisasi penerimaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo tahun 2019 – 2022 selalu berada di atas 100 persen. Pada tahun 2023, tingkat pencapaian penerimaan mengalami penurunan menjadi 83,80 persen atau di bawah 100 persen. Keadaan ini menunjukkan adanya permasalahan yang menyebabkan mengapa realisasi penerimaan pendapatan PBBP2 tahun 2023, tidak tercapai 100 persen. Menurut Plt. Badan Pendapatan Daerah Situbondo, Edy Wiyono (2023) ketidaktercapaian ini disebabkan oleh faktor ekonomi Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan, penyebab lain Inspektorat (2023) mengungkapkan, “target PBBP2 tidak dapat 100 persen terealisasi dikarenakan petugas pemungut pajak (perangkat desa) tidak menyetorkan kembali uang pajak yang sudah dipungut dari Wajib Pajak ke daerah”. Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Pada kegiatan monitoring tersebut disimpulkan adanya indikasi penyalahgunaan pajak PBBP2 oleh oknum petugas pemungut pajak untuk berbagai alasan, seperti keuntungan pribadi, tekanan lingkungan kerja atau bahkan ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang dirasakan oknum terhadap pimpinan di tempat kerja. *Fraud* level bawah (pegawai) lumrah terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara finansial atau non-finansial. *Association of Certified Fraud Examiners* atau ACFE (2019) menyebutkan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan persentasenya menyentuh angka 38%. Hal ini logis terjadi disebabkan karyawan merupakan jabatan terendah dalam struktur organisasi yang benar – benar rentan memperoleh tekanan pribadi maupun dari organisasi, yang kemudian bisa mengganggu psikologis individu tersebut serta berimplikasi terhadap perilaku (niat) individu melakukan *fraud* bila ada peluang (Herman dan Ramadhea, 2021).

Persoalan yang ada di Kabupaten Situbondo mengindikasikan jika kualitas pengelolaan PBBP2 belum dapat disebut berkualitas, dikarenakan pemungut pajak ketika penugasan dipengaruhi tekanan pribadi yang memiliki sifat buruk. Hal ini, merujuk pada Riswati (2022), pengelolaan yang berkualitas tercipta dari tindakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik saat melaksanakan tugas. Pada akhirnya, *fraud* yang dilakukan oleh individu dikembalikan pada sifat masing-masing untuk mendorong niat mereka menjalankan suatu perilaku ketika ada kesempatan.

Perilaku oknum petugas pemungut pajak yang terindikasi menyalahgunaan dana PBBP2 mungkin terjadi bukan karena intensi sendiri, melainkan ada tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang mempengaruhinya agar berperilaku seperti itu. *Theory Planned of Behavior* atau TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), ini menjelaskan tindakan seorang selalu bersumber dari tekanan yang bisa timbul dari harapan orang lain terhadap dirinya (*subjective norm*). Adapun harapan orang lain yang umumnya bersumber dari lingkungan sekitar seperti keluarga, atasan, teman, rekan kerja, serta lain sebagainya memang memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku individu. Rokhayati dkk. (2022) pengelolaan yang baik, timbul akibat keikutsertaan yang positif dari kolega. Berarti, teman bisa mendorong motivasi yang melahirkan tindakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku seseorang, dimana ini juga berpengaruh kepada kualitas pengelolaan (Baskara *et al.*, 2022). Dalam konteks ini, pemungut pajak didorong oleh norma subjektifnya agar melakukan *fraud*, yang akhirnya semakin memperburuk citra pengelolaan PBBP2, sehingga diperlukan tindakan korektif guna membereskan permasalahan ini, yakni melalui penerapan fungsi pengawasan secara aktif.

Fungsi Pengawasan merupakan tanggungjawab Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern pemerintah. Pengawasan yang efektif dilaksanakan melalui audit/pemeriksaan yang tersusun didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Berdasarkan keterangan dari Narasumber (2024), pemeriksaan/audit yang berkaitan dengan pajak tidak diselenggarakan rutin, melainkan tertentu sesuai permintaan melalui monitoring, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan ini menghasilkan *output* laporan kegiatan biasa tanpa rekomendasi perbaikan pada pemerintah daerah. Pengawasan efektif seharusnya memberikan tindakan korektif

supaya kualitas pengelolaan membaik. Auditor Asep (2024) mengungkapkan jika, “pengawasan yang peruntukannya fokus ke pajak daerah belum terlaksana disini”. Padahal, fungsi pengawasan berpengaruh positif atas kualitas pengelolaan (Riyan, 2019). Farina dkk. (2023) pun pengawasan bukan hanya berpengaruh positif, akan tetapi juga signifikan terhadap kualitas pengelolaan.

Pada implementasinya, pengelolaan pajak daerah membutuhkan sinergitas antara sumber daya manusia pelaksana dan fungsi pengawasan, yang dilaksanakan dengan sebaik – baiknya untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas semata – mata demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian guna mengetahui bahwa *subjective norm* dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan ini, peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait pengelolaan PBBP2 dengan mengambil judul, “**Pengaruh Norma Subjektif dan Pengawasan Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka dengan ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo?
2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam guna mengetahui, sebagai berikut:

- 1) Pengaruh norma subjektif terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo;
- 2) Pengaruh pengawasan terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat

Besar harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat, khususnya dalam bidang keilmuan Akuntansi Pemerintahan. Adapun, manfaat yang diharapkan, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis (Bagi Ilmu Pengetahuan)

Besar harapan penelitian ini menjadi bacaan yang menarik serta informatif terkait ilmu akuntansi perpajakan, khususnya berkaitan dengan PBBP2, *subjective norm* dan pengawasan. Penelitian ini besar harapan bisa dijadikan dasar pemikiran baru ataupun referensi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah selaku institusi pemungut pajak daerah, dapat dijadikan bukti, bahan evaluasi, dan *point of view* yang beda untuk mengambil langkah perbaikan pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo kedepannya;
2. Bagi pemerintah Kabupaten Situbondo, dapat menjadi gambaran nyata terkait situasi pengelolaan pajak daerah terkini, sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo;
3. Bagi masyarakat, riset ini bisa dianggap sebagai alat ungkap transparansi oleh pemerintah daerah, sekaligus media pengawasan demi meningkatkan kualitas pengelolaan PBBP2 ke arah lebih baik di masa mendatang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior*, dimana teori ini menjelaskan tentang tindakan atau perilaku individu yang mana dipengaruhi oleh niat sendiri ataupun pandangan sekitarnya, namun tetap kontrol untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan tertentu bergantung pada dirinya sendiri. Teori ini mempunyai tingkat prediksi tinggi, sehingga sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan berperilaku individu. Banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan pajak disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab seseorang yang didorong keinginan pribadi maupun desakan orang terdekatnya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki dan kemudian menjaga kualitas pengelolaan pajak, maka diperlukan upaya perbaikan dari fiskus dan Wajib Pajak, melalui penerapan sistem penilaian mandiri yang lebih baik dengan memahami kebijakan-kebijakan, serta menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa faktor sikap, norma subjektif, serta *perceived behavioral control* secara bersama-sama mempengaruhi niat dan perilaku seorang individu. Teori ini, dikembangkan Ajzen (1991) untuk melengkapi *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan Sheppard et al. (1988) yang menyebutkan niat berperilaku individu ditentukan oleh *attitude* dan *subjective norm*. Selanjutnya, Ajzen memasukkan satu poin lainnya, yaitu *perceived behavioral control*. Arti Kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu individu memiliki keyakinan jika mereka mampu mengontrol dirinya disaat mereka hendak melakukan perilaku (Meliana, 2022).

Teori perilaku terencana menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku, yakni sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap merupakan cara seseorang menilai sebuah perilaku, apakah menguntungkan

ataupun tidak menguntungkan. Kedua, norma subjektif yang merujuk ke dorongan sosial atau *social pressure* dari lingkungan sekitar dalam mengambil sikap. Ketiga ialah persepsi kontrol perilaku, dimana ini berkaitan dengan ekspektasi yang stabil tentang suatu perilaku atau kepercayaan terhadap kemampuan individu dalam melaksanakan suatu perilaku.

Theory of Planned Behaviour (TPB) yakni suatu teori yang berfokus membahas perilaku individu dengan tingkat kekuatan prediktif yang sangat tinggi. Jika, teori ini kemudian dihubungkan dengan pengelolaan pajak daerah di masa saat ini, maka *subjective norm* memiliki hubungan paling erat. Jika pengelolaan pajak baik maka penilaian masyarakat (lingkungan sekitar) bagus, sehingga Wajib Pajak bersedia (termotivasi) membayar pajak. Tingkat kepatuhan yang meningkat membuat masyarakat memandang pengelolaan pajak sudah berkualitas.

2.1.2 Pengawasan

Siagian (2005) pengawasan adalah proses observasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan, guna menjamin pekerjaan yang sekarang digarap berjalan sesuai perencanaan. Pengertian ini menunjukkan hubungan erat pengawasan dengan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan Yahya (2006) yang mengartikan pengawasan sebagai proses penjaminan tujuan-tujuan yang ditetapkan organisasi dapat terwujud. Selain menjamin tujuan dapat tercapai, pengawasan bisa diartikan untuk memperbaiki kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien, serta mendukung visi juga misi organisasi (Sondole dkk., 2015). Pengawasan dapat mempengaruhi tindakan – tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya supaya hal tersebut tidak terjadi. Dengan adanya pengawasan atau kendali yang ketat terhadap proses pengelolaan pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat yang keseluruhan akan dapat meningkatkan kualitas dari pengelolaan pajak itu sendiri.

Beragam persoalan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan perpajakan, biasanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum Wajib Pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang dijalankan sekarang tidak disertai dengan kesadar-

an hukum yang baik oleh Wajib Pajak, sehingga banyak dari mereka mencari-cari peluang melalui lemahnya pengawasan dan aturan yang berlaku (Rizqi, 2018). Ini menunjukkan betapa lemahnya bentuk pengawasan dan pemberlakuan *punishment* didalam ketentuan perpajakan.

Fungsi pemeriksaan atau pengawasan didalam pelaksanaan tata kelola perpajakan sangat dibutuhkan. Pada prinsipnya, fungsi pengawasan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa sistem *self assessment system* diselenggarakan baik guna meminimalisir segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan negara. Rusnan et al. (2020) menyebutkan jika kunci kesuksesan sistem penilaian mandiri terletak pada pengawasan dan penerapan *punishment* sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Perpajakan. Bersama dengan fungsi pengawasan, maka niscaya permasalahan mengenai pengelolaan pajak nantinya mudah diprediksi dan diatasi, serta kualitasnya semakin membaik.

2.1.3 Norma Subjektif

Norma adalah suatu standar hidup yang dipelihara oleh masyarakat tentang suatu perilaku yang baik ataupun tidak baik dilakukan, ketika berhubungan sosial dengan orang lain. Sedangkan, Subjektif ialah sesuatu hal yang didasari perasaan pribadi bukan fakta. Dengan demikian, *Subjective norm* merupakan suatu perilaku yang dilakukan individu, berdasarkan pandangan pribadi dengan mempertimbangkan pandangan atau penilaian dari lingkungannya, seperti keluarga, teman ataupun atasan (Karmanata dan Setiawan, 2019).

Azjen (1988) norma subjektif ialah pandangan seseorang tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Jogyanto (2007) memandang norma subjektif sebagai sebuah pandangan individu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang sedang dipertimbangkan dengan mengacu kepada kepercayaan individu lain. Biasanya, individu bersangkutan akan melihat sejauh mana individu lain yang relevan, mendukung atau tidak mendukung tindakan tersebut. Pengukuran *subjective norms* menggunakan kerangka penilaian-harapan (*valuation expectancy framework*). Dasar untuk penilaian-harapan terdiri dari dua

komponen, yakni kekuatan dari kepercayaan normatif (*normative belief strength*) dan motivasi untuk mematuhi kepercayaan normatif (*motivation to comply*).

2.1.4 Self-Assessment System

Sistem penilaian mandiri atau disebut dengan *Self Assessment System* ialah sistem pemungutan pajak *modern* yang menyerahkan kepercayaan sepenuhnya ke tangan Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan besaran pajak terutang, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya ke administrasi perpajakan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem *self assessment* maka tanggung jawab fiksus bergeser kepada Wajib Pajak. Kini, administrasi perpajakan hanya berfungsi membina, melayani, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, dan menjalankan *reward and punishment* bagi Wajib Pajak yang menyalahi aturan perpajakan (Rusnan *et al.*, 2020).

Self assessment system adalah penanda keseriusan pemerintah Indonesia di bidang perpajakan yakni untuk mewujudkan sistem pemungutan pajak yang lebih berkeadilan, pelayanan pajak yang lebih baik, mengantisipasi perubahan material di bidang perpajakan dan kemajuan teknologi informasi, meningkatkan kapasitas aparatur pajak, melakukan keterbukaan administrasi perpajakan, dan memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Rizqi, 2018). Meskipun sistem pungutan pajak ini mempunyai banyak dampak positif, namun dalam pelaksanaannya *self assessment* memiliki segudang persoalan terkait pelanggaran ketentuan yang berlaku. Apabila kejadian tersebut terus dibiarkan, maka tindak pidana kejahatan perpajakan akan tumbuh subur di Indonesia. Implikasinya, spekulasi masyarakat tentang kualitas pengelolaan perpajakan yang konteksnya negatif semakin berkembang pesat.

2.1.5 Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah

Fungsi pajak daerah bagi pembiayaan pembangunan daerah amat penting, maka tidak heran jika pengelolaan pajak daerah cenderung mendapatkan perhatian masyarakat lebih besar dibandingkan sektor tata kelola pemerintahan lainnya. Saat

ini, tolak ukur keberhasilan pengelolaan pajak daerah ialah aspek transparansi dan partisipasi publik. Apabila kedua aspek tersebut diabaikan, banyak kemungkinan negatif yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah, menurunnya kepercayaan masyarakat yang menyebabkan buruknya reputasi pemerintah. Sehingga, pengelolaan pajak daerah yang memiliki kualitas tinggi dalam pelaksanaannya adalah sebuah keharusan di jaman reformasi perpajakan ini.

2.1.5.1 Kualitas

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, maupun lingkungan agar dapat mencapai harapan yang diinginkan (Goetsch dan Davis, 2014). Harapan ini merupakan milik penerima manfaat, konsumen, ataupun pelanggan. Ini didukung oleh pernyataan Scherkenbach dalam Ariani (2021) yang mengatakan kualitas sangat bergantung pada pelanggan selaku individu yang berharap dapat dipenuhi kebutuhannya dengan produk ataupun jasa yang dihasilkan organisasi. Kualitas tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan dan reputasi di mata masyarakat, namun menjaga kualitas juga akan memberikan motivasi perbaikan kinerja organisasi (Ishikawa dalam Harsoyo, 2021). Tidak ada definisi pasti terkait kualitas, tetapi persamaannya yaitu kualitas ialah suatu proses mengupayakan memberikan produk yang terbaik sesuai harapan konsumen, agar mereka dapat memperoleh kepuasan yang optimal.

Kualitas penting bagi setiap organisasi, baik *profit oriented* atau *non-profit oriented*. Pemerintah merupakan organisasi *non-profit oriented* yang bertanggung jawab memberikan layanan publik yang setara dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik berjalan dengan didukung salah satunya oleh pajak, oleh sebab itu pengelolaan pajak harus berkualitas. Pengelolaan pajak daerah yang baik, mampu menjaga efisiensi perekonomian daerah dan memelihara pertumbuhan daerah secara konstan. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas nantinya akan menimbulkan *multiplier effect*, terutama dalam menyelesaikan permasalahan terkait keuangan yang selama ini susah dituntaskan (Aji dan Vinandha, 2021).

Kualitas harus diukur secara berkala dan *continue* untuk memberikan keyakinan bahwa produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai harapan konsumen.

Tjiptono dan Chandra dalam Kurniasari dan Sugiyanto (2020) menyebutkan ada 5 (lima) dimensi kualitas antara lain *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *empathy*, dan *assurance*. Sedangkan, Hardiansyah (2018) memberikan kriteria lainnya yang dapat digunakan dalam menentukan apakah pelayanan publik terbilang baik atau buruk melalui indikator – indikator pengukuran, sebagai berikut:

- 1) Kejelasan, kepastian kesederhanaan mengenai standar operasional prosedur, persyaratan, unit kerja ataupun petugas yang berwenang, rincian biaya, serta jadwal penyelesaian pelayanan;
- 2) Keamanan, bahwa segala proses sampai pada hasil pelayanan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan terjamin kepastian hukumnya;
- 3) Transparan, bahwa seluruh proses pelayanan diinformasikan tanpa ada yang ditutupi, baik berdasarkan atas permintaan atau tidak agar mudah diketahui, diakses serta dipahami;
- 4) Efisiensi, segala persyaratan pelayanan dibatasi hanya kepada hal – hal yang berkaitan langsung agar tidak ada pengulangan pemenuhan persyaratan.
- 5) Ekonomi, biaya pelayanan yang dikenakan ditetapkan secara wajar, artinya nilai barang tersebut disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan;
- 6) Adil dan merata, pelayanan dilaksanakan merata lagi adil bagi masyarakat;
- 7) Tepat waktu, bahwa pelaksanaan pelayanan dimulai dan diselesaikan dalam periode yang ditentukan; dan
- 8) Kriteria kuantitatif, meliputi jumlah permintaan pelayanan antara satu waktu ke waktu selanjutnya menunjukkan peningkatan ataupun tidak, juga lamanya pelayanan sesuai dengan permintaan masyarakat bersangkutan.

2.1.5.2 Pengelolaan Pajak Daerah

Pengelolaan ialah istilah manajemen yang merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu hal untuk menggapai tujuan yang diharapkan (Suawa *et al.*, 2021). Atau bisa diartikan, pengelolaan yakni suatu upaya menciptakan perubahan sehingga hal baru tersebut mengalami peningkatan nilai serta lebih cocok dengan

kebutuhan saat ini. Pengelolaan merujuk pada kesatuan proses mulai perencanaan, pengorganisasian, implementasi, serta pengawasan untuk mencapai tujuan dengan melibatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki baik manusia ataupun lainnya. Artinya, pengelolaan adalah upaya mengaktualisasikan target yang dituju dengan melewati tahapan *planning*, *organizing*, *actuating*, kemudian *controlling*. Ini sejalan dengan Teori manajemen yang dikemukakan Sukarna (2011), sehingga peneliti menggunakan teori ini supaya dapat menganalisis bagaimana pengelolaan pajak daerah diselenggarakan di Kabupaten Situbondo.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan Undang – Undang kepada orang/badan dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung, yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah sepenuhnya urusan daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya otonomi daerah. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan jika peraturan daerah terkait pajak masih diwajibkan memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat. Walaupun, campur tangan Pemerintah Pusat dalam setiap penyusunan serta aktualisasi peraturan pajak daerah tidak terhindarkan, tetapi dalam pengelolannya Pemerintah Daerah tidak boleh sembarangan. Justru, minimnya kewenangan daerah pada sektor perpajakan harus memotivasi pengelolaan keuangan yang lebih baik, sebab di era sekarang masyarakat semakin bebas berspekulasi buruk kepada pemerintah terkait tata kelola perpajakan di daerah (Suawa dkk., 2021). Selain itu, pengelolaan pajak daerah yang berkualitas juga akan berdampak kepada kenaikan pendapatan daerah naik dan pembangunan daerah maksimal (Siregar, 2021).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengertian pengelolaan pajak daerah adalah proses penyelenggaraan *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling* yang melibatkan pemanfaatan pendapatan dari sektor pajak di daerah dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas yang adil dan merata. Namun seiring perkembangan waktu, masyarakat mulai menuntut adanya keterbukaan dan transparansi di sektor pemerintahan yang didorong oleh berkembangnya berbagai isu, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Beberapa permasalahan tata kelola ini umumnya seputar krisis kepercayaan publik terhadap petugas pengelola pajak daerah yang berdampak tingkat kesadaran dalam

menunaikan kewajiban pajak menurun, hal ini dapat diatasi apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola pajak melakukan *upgrading* pemahaman tentang pengelolaan pajak yang baik (Bappenda Indragiri Hulu, 2015). Adapun, tujuan pengelolaan perpajakan adalah menjaga amanah yang diberikan oleh seluruh Wajib Pajak kepada negara untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan negara, melalui pelayanan publik yang adil dan merata.

Penilaian pengelolaan perpajakan daerah dapat dianalisis dengan kerangka kerja yang disebut Standar Indeks Kinerja Administrasi Pajak Daerah atau SIKAP oleh Kementerian Keuangan (2021). Standar ini menjelaskan 9 (sembilan) elemen yang dibagi kedalam 3 (tiga) perspektif penilaian, sebagai berikut:

1. Penerimaan, terdiri dari parameter perencanaan dan realisasi;
2. Operasional, meliputi parameter data, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, serta pelayanan; dan
3. Tata Kelola, parameternya yaitu teknologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta terakhir kepatuhan internal & transparansi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian lampau dari hasil penelitian, yang dijadikan pembandingan bagi suatu penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Beberapa penelitian yang dijadikan pedoman, menjadi sumber inspirasi baru bagi peneliti selanjutnya guna mendapatkan orisinalitas dan pembaruan dari penelitian. Adapun, penelitian yang peneliti sudah rangkum untuk dijadikan rujukan didalam penelitian, sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Karimah (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel	Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

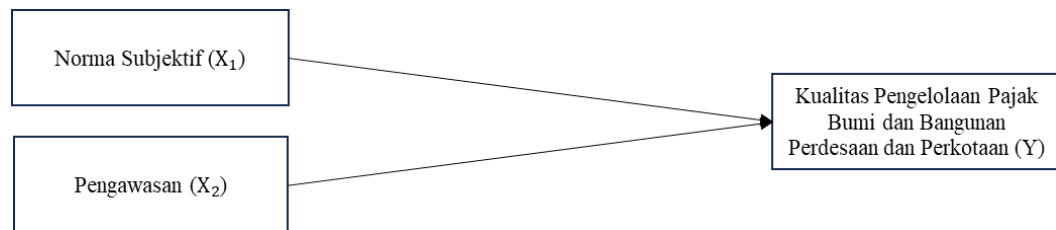
No	Peneliti	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
			Independen: Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan	
2.	Riyan (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bekasi	Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan, Transparansi dan Pengawasan	Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.	Aprinthasari dan Widiyanto (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi	Variabel Dependen: Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Variabel Independen: Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial	Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial berpengaruh positif dan secara simultan terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
4.	Alfarizi dkk (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan	1. Akuntabilitas dan Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Transparansi dan Pengawasan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	Kamila dkk (2021)	Pengaruh Lingkungan Keluarga dan <i>Financial Literacy</i> Terhadap <i>Financial Management Behavior</i> pada Mahasiswa	Variabel Dependen: <i>Financial Management Behavior</i> Variabel Independen: Lingkungan Keluarga dan	Lingkungan Keluarga dan <i>Financial Literacy</i> mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap <i>Financial Management Behavior</i> .

No	Peneliti	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
			<i>Financial Literacy</i>	
6.	Baskara dan Sumardi (2022)	Peran <i>Communication Transparency, Trust, Attitude, Subjective Norms</i> dan <i>Perceived Behavioral Control</i> Terhadap <i>Money Management Intention</i>	Variabel Dependen: <i>Money Management Intention</i> Variabel Independen: <i>Communication Transparency, Trust, Attitude, Subjective Norms</i> dan <i>Perceived Behavioral Control</i>	<i>Communication Transparency, Trust, Attitude, Subjective Norms</i> dan <i>Perceived Behavioral Control</i> berpengaruh terhadap <i>Money Management Intention</i>
7.	Rokhayati dkk (2022)	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan	Variabel Dependen: Perilaku Pengelolaan Keuangan Variabel Independen: Literasi keuangan, Sikap keuangan, <i>Locus of control</i> , dan Teman sebaya	Literasi keuangan, Sikap keuangan, <i>Locus of control</i> , dan Teman sebaya berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Perilaku pengelolaan keuangan
8.	Cahyani (2023)	Dampak Pemahaman Literasi Keuangan dan <i>Locus of Control</i> pada Ibu Rumah Tangga dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Keluarga	Variabel Dependen: Implementasi Pengelolaan Keuangan Keluarga Variabel Independen: Pemahaman Literasi keuangan dan <i>Locus of Control</i>	1. Literasi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan 2. <i>Locus of Control</i> berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan
9.	Farina dkk (2023)	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Dimediasi	Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan,	1. Sistem Informasi Keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. 2. Sistem Informasi Keuangan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
		Komitmen Organisasi	Transparansi dan Pengawasan	berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen Organisasi. 3. Pengawasan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Komitmen Organisasi. 4. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. 5. Komitmen Organisasi mampu memediasi Sistem Informasi serta Pengawasan Keuangan dalam mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2017) kerangka pemikiran adalah hubungan antar variabel yang dihimpun dari beberapa teori yang divisualisasikan dalam gambar dan dideskripsikan sebagai bahan argumentasi peneliti dalam hipotesis. Kerangka pemikiran bertujuan mengidentifikasi apakah ada pengaruh diantara variabel bebas dan variabel terikat. Lebih jelas, hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, penelitian ini mempunyai 2 variabel bebas, yaitu norma subjektif (X_1) dan pengawasan (X_2) yang diujikan terhadap 1 variabel terikat, kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y). Mulia dan Rochmoeljati (2021) kualitas yakni pengukuran suatu produk/jasa, yang hasilnya bergantung pada standar kepuasan konsumen. Pengelolaan adalah proses yang terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi, serta pengawasan guna mencapai tujuan tertentu organisasi. Dalam konteks ini, kualitas pengelolaan PBBP2 berarti serangkaian proses pengolahan yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah, dimana baik ataupun buruknya ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat sebagai konsumen. Pengelolaan PBBP2 yang akurat, akuntabel, serta transparan merupakan harapan seluruh rakyat di daerah.

Masalah pengelolaan PBBP2 di Situbondo, ialah keterbatasan sumber daya manusia yang masih rendah. Rendahnya sumber daya manusia ini berdampak luar biasa terhadap kualitas pengelolaan PBBP2, yang berujung penerimaan PAD tidak optimal. Faktanya, pelanggaran terjadi dan berkelanjutan di Kabupaten Situbondo, salah satunya dengan perilaku mereka tidak menyetorkan hasil penagihan kepada daerah untuk keuntungan pribadi. *Fraud* ini jika dilanjutkan tanpa perbaikan maka kualitas pengelolaan PBBP2 tidak akan berkembang ke arah yang lebih baik.

Persoalan yang diabaikan tanpa penyelesaian dapat memperbesar peluang kecurangan terjadi berkelanjutan. Oleh sebab itu fungsi pengawasan perlu dijalankan rutin melalui pemeriksaan/ atau audit rutin yang mempunyai nilai ungukit yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan PBBP2. Fungsi Pengawasan yang baik akan membuat pengelolaan PBBP2 yang lebih cepat, tepat, akuntabel, serta transparan sesuai harapan masyarakat. Pengelolaan pajak daerah berkualitas bisa terwujud jika terdapat sinergitas antara sumber daya manusia yang bertindak

baik dan fungsi pengawasan yang berjalan. Berdasarkan penjabaran dari kerangka pemikiran teoritis diatas, peneliti menarik hipotesis bahwasannya *subjective norm* dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Penelitian ini mengambil objek penelitian perangkat desa, yang bertugas melaksanakan pemungut pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo.

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Azjen (1991) melalui *Theory of Planned Behavior*, norma subjektif adalah pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang diperoleh serta mempengaruhinya untuk mengerjakan suatu perilaku. Pemungut pajak PBBP2 sangat berpotensi melakukan tindakan yang menyeleweng dari ketentuan, seperti tidak menyetorkan dana PBBP2 yang telah dipungut kepada daerah. Yushinta dalam Cahyani (2023) Kontrol diri (tidak terpengaruh sekitar) berpengaruh dalam pengelolaan keuangan yang makin terarah. Tindakan petugas pemungut PBBP2 yang melawan peraturan menunjukkan jika kontrol diri oknum tersebut tidak dapat meredam tekanan sosial yang diterimanya, sehingga berdampak kepada pengambilan keputusan untuk berperilaku yang salah dan membuat pengelolaan pajak yang tidak terarah. Teori ini, menggambarkan seberapa besar tekanan sosial dari lingkungan sekitar berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keseluruhan. Penelitian Widiyanto dan Aprinthsari (2020) menyatakan bahwa tekanan sosial mempengaruhi seorang individu dalam pengelolaan. Adapun penelitian lain yang mendukung hipotesis ini, yakni Baskara et al. (2022) norma subjektif berpengaruh terhadap tindakan pengelolaan individu. Norma subjektif individu paling mungkin ditimbulkan dari dorongan lingkungan terdekat semisal keluarga, teman, dan atasan (Rokhayati dkk., 2022). Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik hipotesis pertama, yakni:

H₁: Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah.

2.4.2 Pengaruh Pengawasan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Terry (2005) pengawasan merupakan proses penjaminan pencapaian *goals* organisasi sesuai rencana. Pengawasan berperan penting dalam menjamin kualitas pengelolaan PBBP2 selama proses penyelenggaraannya. Di Kabupaten Situbondo, SDM pemungut pajak cukup dipengaruhi tekanan yang bersumber dari pribadinya oleh karena itu mereka dapat bertindak melawan ketentuan. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memperkecil potensi kecurangan pemungut pajak PBBP2. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini antara lain, Karimah (2018) pengawasan memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu Farina et al. (2023) menyatakan pengawasan berpengaruh signifikan serta positif terhadap pengelolaan keuangan. Riyan (2019) menyimpulkan adanya pengawasan diharapkan memperkecil kecurangan yang dilaksanakan oknum pemungut pajak yang berpikir akan melanggar aturan dengan tindakan tidak patut yang sangat merugikan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti pun menarik hipotesis kedua, sebagai berikut:

H₂: Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian ilmiah, yang mana langkah – langkah beserta prosedurnya dilakukan sistematis, teratur, dan disesuaikan dengan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk membuktikan keabsahan suatu teori, baik pengaruh dan/atau hubungan atas sebuah variabel (Satori dan Komariah, 2020). Adapun dari segi metode, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *policy research*. *Policy research* ialah penelitian yang biasanya membahas terkait permasalahan sosial mendasar di masyarakat, dimana hasilnya kemudian direkomendasikan pada pihak berkepentingan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah data yang bersifat kuantitatif, artinya seluruh data yang dipakai umumnya berbentuk angka atau kalimat yang dikuantitatifkan. Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya diperoleh dari objek penelitian dan juga pihak lainnya yang mempunyai keterikatan dengan topik penelitian.

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden, melalui pelaksanaan wawancara, observasi, serta kuesioner (Syafnidawaty, 2020). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang disebarkan secara *online*, melalui *google form* kepada responden yang sesuai kriteria penelitian. Wawancara juga akan dipergunakan jika diperlukan. Dan, untuk data sekunder didapatkan dari sumber yang mempunyai informasi terkait penelitian tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni jurnal, buku, dan artikel internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Kuesioner yang digunakan pada penelitian yaitu skala nominal, yang dirancang untuk menguji apakah subjek penelitian setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Terdapat 5 alternatif pilihan jawaban, sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Likert

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	STS = Sangat Tidak Setuju	1
2	TS = Tidak Setuju	2
3	N = Netral	3
4	S = Setuju	4
5	SS = Sangat Setuju	5

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Peneliti dengan ini tidak dapat mempelajari seluruh populasi yang ada dikarenakan adanya keterbatasan waktu beserta tenaga yang dimiliki. Maka, peneliti memakai sampel yang diperoleh dari populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian, ialah petugas pemungut PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), yang aktif serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Adapun, jumlah petugas pemungut PBBP2 sebanyak 528 orang petugas.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki populasi. Adapun, penentuan sampel penelitian dilakukan melalui *simple random sampling*. Metode pemilihan sampel ini dipilih atas dasar pertimbangan tertentu dari peneliti (Notoatmodjo, 2010). Sampel masih bagian dari karakteristik populasi (Sugiyono, 2017). Petugas Pemungut PBBP2 yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa merupakan sampel dari penelitian ini, yang dihitung memakai rumus Slovin. Rumus Slovin bisa diukur, sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin :} \quad n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

$$\text{Jumlah Sampel Petugas : } \frac{528}{1 + 528 (0,1)^2} = 84 \text{ Petugas}$$

Dari perhitungan diatas, didapatkan jumlah sampel sebanyak 84 petugas pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo, terpilih dengan menggunakan metode *simple random sampling*.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pemikiran penelitian, terdapat 2 (dua) kategori variabel yang digunakan yaitu *variable dependent* (variabel terikat) dan *variable independent* (variabel bebas). Pemberian skor dalam *form/kuesioner* menggunakan pengukuran skala *likert*, dimana skala ini tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga peringkat *construct* yang diukur untuk memberikan informasi nilai suatu data.

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) (Y)

Variabel dependen ialah variabel utama penelitian yang menjadi urgensi penelitian tersebut menarik untuk diteliti atau garis besarnya disebut sebagai fokus utama riset yang akan dilaksanakan (Chandrarin, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak yang berkualitas merupakan proses penyelenggaraan *planning, organizing, actuating*, serta *controlling* yang melibatkan pemanfaatan penerimaan pendapatan di sektor pajak, dimana transparansi dan akuntabilitasnya terjamin sehingga tujuan yang diharapkan terwujud.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*) (X)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan menimbulkan suatu karena perubahan atau menjadi penyebab adanya variabel terikat (dependen). Variabel bebas yang digunakan didalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Norma Subjektif (X_1)

Jogiyanto (2007) mendefinisikan norma subjektif sebagai sebuah pandangan suatu individu melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan dalam pertimbangan dengan mengacu pada kepercayaan orang lain. Individu dapat memotivasi individu lain untuk berperilaku memenuhi harapan mereka.

2) Pengawasan (X_2)

Fungsi pemeriksaan atau pengawasan didalam pelaksanaan tata kelola perpajakan yang sangat penting. Pada prinsipnya, fungsi pengawasan bertujuan untuk memberikan keyakinan jika pengelolaan pajak daerah yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan sebaik mungkin guna mengurangi seluruh bentuk penyelewengan yang dapat merugikan negara/daerah.

Tabel 5. Operasional Variabel Dependen dan Independen

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Norma Subjektif (X_1) (Modifikasi dari Husniyati, 2018)	Menumbuhkan Motivasi	Teman mendorong saya menyelesaikan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku	<i>Likert</i>	1
		Keluarga memberikan motivasi supaya bersikap jujur dan amanah saat menjalankan tugas	<i>Likert</i>	2
		Para pimpinan menjadi tauladan saya saat menunaikan kewajiban sebagai pemungut pajak	<i>Likert</i>	3
Pengawasan (X_2) (Modifikasi dari Khasanah, 2020)	Efektivitas peran pengawasan	Terdapat pengawasan secara rutin oleh Inspektorat Daerah terkait pelaksanaan pemungutan PBBP2	<i>Likert</i>	4
		Inspektorat Daerah dan Bapenda memberikan pembinaan sebelum pelaksanaan pemungutan PBBP2	<i>Likert</i>	5
		Inspektorat Daerah dan Bapenda memberikan pembinaan setelah	<i>Likert</i>	6

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
		pelaksanaan pemungutan PBBP2		
		Inspektorat Daerah dan Bapenda memberikan evaluasi terkait pelaksanaan PBBP2	<i>Likert</i>	7
		Realisasi PBBP2 tercapai sesuai target yang ditetapkan	<i>Likert</i>	8
Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah (Y) (Modifikasi dari SIKAP Kementerian Keuangan, 2021).	Perencanaan	Perencanaan target yang ditetapkan sudah sesuai dengan jumlah Wajib Pajak PBBP2	<i>Likert</i>	9
	Realisasi	Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan terkait dengan petunjuk teknis pemungutan PBBP2	<i>Likert</i>	10
	Data	Pelaksanaan pemungutan telah didukung oleh pemutakhiran data yang valid	<i>Likert</i>	11
	Pelaporan	Pelaporan PBBP2 dilakukan tepat waktu, transparan dan akuntabel	<i>Likert</i>	12
	Pembayaran	Pembayaran PBBP2 terutang dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan	<i>Likert</i>	13
	Pemeriksaan	Pemeriksaan dilakukan dengan memvalidasi dan memverifikasi riil di lapangan terhadap bukti dan daftar tunggakan pajak	<i>Likert</i>	14
	Penagihan	Penagihan dilakukan sesuai dengan nominal yang terhutang didalam SPPT PBBP2	<i>Likert</i>	15
	Pelayanan	Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Pajak terbaru aktif dilakukan oleh petugas pemungut PBBP2	<i>Likert</i>	16
	Teknologi Informasi	Sistem informasi Bapenda mudah diakses oleh petugas pemungut PBBP2/Wajib Pajak	<i>Likert</i>	17
	Sumber Daya Manusia	Petugas pemungut PBBP2 mendapatkan pelatihan yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas	<i>Likert</i>	18
	Organisasi	Petugas pemungut PBBP2 telah ditetapkan resmi melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah	<i>Likert</i>	19
	Kepatuhan Internal	Portal pengaduan pelanggaran tersedia dan mudah diakses	<i>Likert</i>	20
	Transparansi	Publikasi penyetoran hasil pungutan PBBP2 telah dilakukan secara transparan	<i>Likert</i>	21

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik Regresi Linier Berganda. Regresi linier sangat cocok diterapkan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Ghazali (2018) regresi linier adalah salah satu model regresi yang tujuannya guna mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penganalisisan data penelitian ini dibantu dengan aplikasi *Statistical Program for Social Science* atau SPSS (*version 22*). Tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas diterapkan guna menguji kenormalan suatu distribusi data. Pengujian ini dilakukan sebelum melaksanakan pengujian *parametric-test* (Sarjono dan Julianita, 2011). Dan, metode yang dipergunakan dalam pengujian normalitas adalah uji *kolmogorov-smirnov* (Uji K-S). Metode ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis dan menghasilkan nilai *p-value*. Jika nilai *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan (misal $\alpha = 0,05$), maka data dianggap mengikuti distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi (Sugiyono, 2017).

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ialah analisis statistik yang dipergunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen dalam suatu model regresi berkorelasi satu sama lainnya. Artinya, uji ini diaplikasikan guna melihat hubungan linieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Apabila ketika pengujian dilakukan dan ternyata terdapat korelasi antar variabel independen, maka salah satu variabel dikeluarkan. Ada atau tidaknya multikolinieritas dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Angka *tolerance* suatu model regresi ialah mendekati 1. Dan, batas VIF yaitu 10, sehingga jika VIF bernilai dibawah 10 maka dipastikan bahwa terdapat multikolinieritas didalam model regresi tersebut.

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas diterapkan dengan tujuan guna mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan *varians* dari residual antar suatu pengamatan ke pengamatan lainnya didalam model regresi (Ghozali, 2013). Jika *varians* dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan, apabila sebaliknya disebut dengan heteroskedastisitas. Didalam pengujian ini juga dilakukan uji Glejser, yang mana caranya dengan meregresi nilai *absolute* residual model yang diestimasi terhadap variabel independen berdasarkan asumsi, sebagai berikut:

1. Jika probabilitas signifikansi diatas tingkat 5%, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika probabilitas signifikansi dibawah tingkat 5%, maka model regresi terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Validitas

Uji validitas adalah ketepatan mengukur kevalidan dari suatu instrument. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat instrument dalam melakukan fungsinya (Widodo dkk., 2023). Kegunaan uji validitas dalam riset ini, adalah untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas dan mengetahui validitas dari kuesioner yang disusun. Perhitungan validitas menggunakan *korelasi pearson* atau rumus *korelasi product moment*, sebagai berikut:

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r_{hitung} : Koefisien korelasi
 X : Variabel independen
 Y : Variabel dependen
 n : Banyak responden

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS 22.0 *for windows* dengan kriteria, sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dikatakan valid;
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dikatakan tidak valid;
- 3) Nilai Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dilihat pada kolom *corrected item total correlation*.

3.5.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang mempunyai konsistensi, jika pengukuran tersebut dilakukan dengan instrumen itu dilaksanakan secara berulang atau singkatnya pengujian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu test bisa dipercaya (artinya, skor yang dihasilkan konsisten, walau diujikan di kondisi yang berbeda – beda). Sehingga, instrument yang mempunyai reliabilitas yang tinggi disebut dengan instrumen yang paling reliabel (Widodo dkk., 2023). Penelitian ini, menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) dengan ketentuan (Ghozali, 2018), antara lain:

1. Bila angka *Cronbach Alpha* $> 0,70$, maka dinyatakan reliabel; dan
2. Bila angka *Cronbach Alpha* $< 0,70$, maka dinyatakan tidak reliabel.

3.5.6 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah model regresi yang bertujuan mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas, dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 22. Hasil dari analisis ini, menguji seberapa besar norma subjektif dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan PBBP2. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

X_1 : Norma Subjektif i pada periode t

X_2 : Pengawasan i pada periode t

- Y : Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah i pada periode t
 β_0 : Konstanta
 β_{1-2} : Koefisien Regresi
 ϵ : *error* (Kesalahan)

3.5.6.1 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur pengujian yang dilakukan melalui pengujian statistik berdasarkan data sampel yang dimiliki guna memutuskan menerima atau menolak hipotesis penelitian yang diajukan (Kurniawan dan puspitaningtyas, 2016). Pada penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan beberapa pengujian antara lain:

3.5.6.1.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini menjadi dasar atas pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Zaenuddin (2018) menyebutkan jika pengujian t memang bertujuan mengamati seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam membuktikan variasi variabel dependen. Pengujian tersebut menganggap variabel bebas lainnya konstan dan menggunakan tingkat signifikansi 0,005 ($\alpha = 5\%$). Adapun, kriteria penerimaan dan penolakan sebuah hipotesis pada uji t, antara lain:

1. Jika signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima secara parsial variabel norma subjektif dan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan pajak daerah.
2. Jika signifikansi $\geq 0,05$, maka hipotesis ditolak secara parsial variabel norma subjektif dan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan pajak daerah.

3.5.6.1.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Zaenuddin (2018) nilai F

hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel, dengan derajat kebebasan *df denominator* $n - k$ dan *df nominator* $k - 1$. Machali (2015) dalam melakukan pengujian signifikansi berdasarkan nilai F yakni jika nilai F hitung \geq F tabel, maka hipotesis ditolak (signifikan), apabila sebaliknya maka hipotesis diterima (tidak signifikan).

3.5.6.1.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi ialah koefisien yang menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam sebuah model regresi. Koefisien determinasi (R^2) menerangkan seberapa besar komposisi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 terletak diantara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Zaenuddin (2018) jika nilai R^2 kecil artinya kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan variabel independen sangat terbatas, namun jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik regresi tersebut sebab mampu menjelaskan data aktualnya. Sehingga, nilai R^2 sebaiknya tidak mendekati angka 0 karena hal ini membuktikan bahwa regresi tersebut memiliki garis yang kurang baik (Basuki, 2015).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini sudah berdiri sejak tahun 1972, dimana saat ini daerah tersebut terkenal dengan semboyannya, “Bumi Sholawat Nariyah”. Dewasa ini, Kabupaten Situbondo mengalami kemajuan yang pesat, yang ditandai dengan segudang penghargaan berhasil diraih seperti TOP Digital Implementation Level Stars 4, Top Leader on Digital Implementation dan juga Top CIO on Digital Implementation pada ajang Top Digital Awards 2021. Seluruh capaian *reward* ini, tentunya tidak luput dari keikutsertaan masyarakat Situbondo secara luas dan juga kontribusi dari kebijakan Bupati Drs. H. Karna Suswandi, M.M bersama wakilnya Hj. Khoirani, S. Pd, MM yang aktif dan tepat.

Sampel penelitian ini adalah petugas pemungut PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) aktif, yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah petugas pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo sejumlah 528 orang. Jumlah sampel yang digunakan ialah 84 petugas pemungut PBBP2, dipilih dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Kuesioner diberikan melalui media *google form* pada 84 responden. Jumlah responden yang digunakan diperoleh dari 84 responden tercepat dari total 108 responden, yang sudah mengisi *google form* dari tanggal 15 April – 13 Mei 2024. Responden bersangkutan mempunyai karakteristik yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan peneliti, sehingga mereka mampu menjawab setiap item – item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Berikut ini, disajikan statistik deskriptif tiap variabel penelitian yang dipakai didalam penelitian ini, data ini berkaitan dengan karakteristik sampel penelitian. Karakteristik responden didalam penelitian ini meliputi: Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, serta Masa Kerja.

Tabel 6. Karakteristik Responden

Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	47	55,9
Perempuan	37	44,1
Umur:		
21 – 30 tahun	22	26,1
31 – 40 tahun	30	35,7
41 – 50 tahun	21	25,1
> 50 tahun	11	13,1
Pendidikan Terakhir:		
SMA Sederajat	48	57,1
Diploma	12	14,3
Sarjana	24	28,6
Lama Kerja:		
1 – 5 tahun	28	33,3
6 – 10 tahun	29	34,5
11 – 15 tahun	24	28,6
16 – 20 tahun	3	3,6
Total Responden	84	

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dirangkum dalam Tabel 4.1, diketahui bahwa pemungut PBBP2 dominan, ialah laki – laki. Menimbang geografis daerah, Kabupaten Situbondo memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km dengan kondisi dataran yang bervariasi (rendah dan tinggi), serta infrastruktur yang belum merata membuat laki – laki dipandang tepat melakukan penugasan ini. Sedangkan dari sisi usia, pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo masuk ke dalam kategori usia produktif yakni 15 – 64 tahun. Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan, para pemungut PBBP2 dapat dikatakan terdidik. Terakhir, pemungut pajak berasal dari orang – orang yang berpengalaman.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan guna menyajikan dan menganalisis data disertai perhitungan supaya bisa memperjelas keadaan atau karakteristik yang

bersangkutan. Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi agar mudah dipahami serta diinterpretasikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai data penelitian dan untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian yang digunakan tabel distribusi frekuensi sehingga dapat menunjukkan mean, maksimum, dan standar deviasi dari tiap sampel yang diteliti (Ghozali, 2018). Hasil pengolahan data statistik deskriptif variabel penelitian tampak pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Norma Subjektif (X_1)	84	7	15	11,90	1,6546
Pengawasan (X_2)	84	14	25	19,29	2,3581
Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	84	41	65	51,88	4,1403

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dalam Tabel 4.2 diperoleh informasi jika variabel Norma Subjektif menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,90. Nilai terendah variabel Norma Subjektif sebesar 7 serta nilai tertinggi 15. Standar deviasi sebesar 1,6546. Hal ini berarti, nilai standar deviasi yang mendekati nilai rata-rata (*mean*) dan juga ukuran penyebaran data yang semakin kecil. Dan, untuk variabel Pengawasan menunjukkan nilai *mean* yaitu 19,29 dengan nilai terendah variabel sebesar 14 dan nilai tertinggi yaitu 25 serta standar deviasi senilai 2,3581. Hal ini menunjukkan nilai standar deviasi yang mendekati nilai *mean* serta ukuran penyebaran data yang semakin kecil. Terakhir, Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan nilai *mean* sebesar 51,88, dengan nilai terendah variabel senilai 41 dengan nilai tertingginya yakni 65. Adapun, standar deviasinya adalah 4,1403. Hal ini berarti nilai standar deviasi yang mendekati nilai *mean* dan ukuran penyebaran data yang semakin kecil.

4.3 Uji Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuisioner yang digunakan dalam pengumpulan data (Ghozali, 2013). Pengujian ini, dilaksanakan secara statistik dengan menghitung korelasi antar setiap pernyataan dengan skor dengan memakai metode *Pearson Correlation*. Suatu data dinyatakan *valid*, apabila nilai r_{hitung} yang menggunakan nilai dari *Corrected Item Correlation* lebih besar dari nilai r_{tabel} pada signifikansi 0,05 atau sama 5%. Hasil uji validitas penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R _{tabel}	R _{hitung}	Sig	Ket
Norma Subjektif (X ₁)	X1.1	0,213	0,797	0,000	Valid
	X1.2	0,213	0,722	0,000	Valid
	X1.3	0,213	0,637	0,000	Valid
Pengawasan (X ₂)	X2.1	0,213	0,577	0,000	Valid
	X2.2	0,213	0,677	0,000	Valid
	X2.3	0,213	0,631	0,000	Valid
	X2.4	0,213	0,559	0,000	Valid
	X2.5	0,213	0,632	0,009	Valid
Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Y.1	0,213	0,576	0,000	Valid
	Y.2	0,213	0,611	0,000	Valid
	Y.3	0,213	0,456	0,000	Valid
	Y.4	0,213	0,519	0,000	Valid
	Y.5	0,213	0,616	0,000	Valid
	Y.6	0,213	0,386	0,000	Valid
	Y.7	0,213	0,547	0,000	Valid
	Y.8	0,213	0,618	0,000	Valid
	Y.9	0,213	0,465	0,000	Valid
	Y.10	0,213	0,371	0,001	Valid
	Y.11	0,213	0,403	0,000	Valid
	Y.12	0,213	0,326	0,003	Valid
	Y.13	0,213	0,254	0,020	Valid

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.3, terlihat jika korelasi antara masing – masing indikator variabel Norma Subjektif (X₁), Pengawasan (X₂), serta Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y), menunjukkan bahwa $r_{hitung} >$

r_{tabel} dan signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan seluruh *item* pertanyaan dari variabel Norma Subjektif (X_1) dan Pengawasan (X_2) serta variabel Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dinyatakan *valid*.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah suatu pengukuran yang mempunyai konsistensi atau suatu derajat keakuratan/ajeg yang dilihatkan oleh alat pengukuran (Widodo dkk., 2023). Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0 diambil *cronbach's alpha*. Nilai suatu variabel dapat dinyatakan *reliable*, bila memberikan *cronbach's alpha* $> 0,70$. Hasil Uji Reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alpha if item deleted</i>	Standar realibilitas	Keterangan
Norma Subjektif (X_1)	0,785	0,70	Reliabel
Pengawasan (X_2)	0,741	0,70	Reliabel
Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,711	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.4, diketahui jika pengujian reliabilitas pada instrument variabel Norma Subjektif (X_1), Pengawasan (X_2), dan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y), nilai *Cronbach's Alpha* atau *r alpha* ketiganya berada diatas 0,70. Pengujian tersebut membuktikan, instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yaitu reliabel, sebab *r alpha* bernilai lebih besar daripada standar realibilitas.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan guna menguji kenormalan suatu distribusi data. Pengujian ini dilakukan sebelum melaksanakan pengujian *parametric-test* (Sarjono dan Julianita, 2011). Dan, metode yang dipergunakan dalam pengujian normalitas adalah Uji *Kolmogorov – Smirnov* (Uji K – S). Uji K – S dilakukan dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis, menghasilkan nilai *p-value*. Jika nilai *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, (semisal $\alpha = 0,05$) maka data tersebut dianggap mengikuti distribusi normal, artinya asumsi normalitas terpenuhi (Sugiyono, 2017). Hasil uji normalitas pada riset ini, sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Nilai <i>Kolmogorov – Smirnov</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,200	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 6)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas yakni 0,200 atau signifikansi variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga, data dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ialah analisis statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen dalam suatu model regresi berkorelasi satu sama lainnya. Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk melihat hubungan linieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Apabila pengujian dilakukan dan ternyata terdapat korelasi antar variabel bebas, maka salah satu variabel akan dikeluarkan. Ada atau tidaknya multikolinieritas dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Angka *tolerance* suatu model regresi ialah mendekati 1. Nilai VIF yaitu 10, sehingga VIF bernilai dibawah 10 dipastikan bahwa terdapat multikolinieritas dalam model regresi tersebut. Hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Norma Subjektif (X_1)	0,855	1,170	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengawasan (X_2)	0,855	1,170	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 6)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.6, diketahui bahwa model tidak terjadi multikolinieritas. Hal tersebut ditandai dengan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF setiap variabel independent kurang dari 10.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilaksanakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan *varians* dari residual antar suatu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2013). Jika *varians* dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila terjadi sebaliknya, disebut dengan heteroskedastisitas. Didalam pengujian ini juga dilakukan uji Glejser, yang mana caranya dengan meregresi nilai *absolute* residual model yang diestimasi terhadap variabel bebas berdasarkan asumsi. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig	Keterangan
Norma Subjektif (X_1)	0,265	Tidak Heterokesdastisitas
Pengawasan (X_2)	0,636	Tidak Heterokesdastisitas

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 6)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.7, diketahui bahwasannya nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tidak terjadi heterokesdastisitas dari persamaan yang diuji.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi yang memiliki tujuan guna mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilakukan melalui *software* SPSS 22.0. Hasil dari analisis ini, menguji seberapa besar variabel Norma subjektif serta Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas pengelolaan PBBP2. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ini dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstanta	26,704	0,000	Signifikan
Norma Subjektif (X_1)	0,795	0,001	Signifikan
Pengawasan (X_2)	0,815	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 5)

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = 26,704 + 0,795X_1 + 0,815X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Konstanta pada persamaan regresi linier ini yaitu 26,704. Artinya, jika Norma subjektif (X_1) dan Pengawasan (X_2) bernilai 0,000 maka Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBBP2 (Y) mengalami peningkatan;
2. Nilai koefisien regresi Norma Subjektif (X_1), yakni senilai 0,795. Ini berarti, Norma subjektif berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2;
3. Nilai koefisien regresi Pengawasan (X_2), yaitu 0,815. Ini berarti, Pengawasan berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2; dan
4. Pengawasan (X_2) adalah variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian ini menjadi dasar saat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Zaenuddin (2018) menyebutkan pengujian t bertujuan untuk mengamati seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam membuktikan variasi variabel dependen. Uji t menganggap variabel bebas lainnya konstan dan menggunakan tingkat signifikansi 0,005 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji t

Variabel	Sig
Norma Subjektif (X_1)	0,001
Pengawasan (X_2)	0,000

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 4.9 bisa diketahui besar dari pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh Norma Subjektif (X_1) terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 (Y)
Tingkat probabilitas variabel norma subjektif (α) yaitu 0,001. Artinya, Norma subjektif berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 disebabkan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka terbukti kebenarannya (H_1 diterima).
2. Pengaruh Pengawasan (X_2) terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 (Y)
Tingkat probabilitas pengawasan (α), yaitu 0,000. Artinya Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 sebab nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka terbukti kebenarannya (H_2 diterima).

4.6.2 Uji F

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan dengan memakai tingkat signifikansi 0,05. Zaenuddin (2018), nilai F hitung selanjutnya akan diperbandingkan dengan F table, derajat kebebasan df

denominator $n-k$, serta df nominator $k-1$. Machali (2015) melakukan pengujian signifikansi berdasarkan nilai F yakni jika nilai F hitung \geq F tabel, maka hipotesis ditolak (signifikan), apabila sebaliknya maka hipotesis diterima (tidak signifikan). Hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 15. Hasil Uji F

Variabel	Sig.
Residual	0,000

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil Uji F dalam Tabel 4.10 menunjukkan model regresi memiliki nilai Tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Model tersebut berarti signifikan dan dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95%.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ialah koefisien yang menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi. Koefisien determinasi (R^2) menggambarkan seberapa besar komposisi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Zaenuddin (2018) apabila nilai dari R^2 kecil, artinya kemampuan variabel terikat dalam menjelaskan variabel bebas sangat terbatas, akan tetapi jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik regresi tersebut, karena mampu menjelaskan data aktualnya (Basuki, 2015). Hasil uji R^2 penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji R^2

R	R Square	Adjusted R Square
0,654	0,428	0,414

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil uji R^2 dalam Tabel 4.11 menyebutkan model memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,414. Artinya, pengaruh yang diberikan variabel

Norma subjektif (X_1) juga Pengawasan (X_2) terhadap kualitas pengelolaan PBBP2 sebesar 41,4%. Sedangkan, sisanya sebesar 58,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)

Hasil analisis regresi linier berganda pada pengujian t terhadap hipotesis pertama (H_1) bisa dilihat pada Tabel 4.9 bahwa Norma subjektif (X_1) berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2, ini dilihat dari nilai signifikansinya senilai 0,001. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif signifikan, mempunyai arti bahwa semakin tinggi Norma subjektif maka akan meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (H_1 diterima).

Azjen (1991) norma subjektif yaitu pandangan seseorang tentang tekanan sosial yang mampu mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku. Pemungut pajak PBBP2 tentu berpotensi mengambil tindakan yang menyimpang dari aturan, seperti tidak menyetorkan dana PBBP2 yang sudah dipungut kepada pemerintah daerah. Cahyani (2023) menyebutkan jika kemampuan mengendalikan diri (tidak terpengaruh lingkungan sekitar) berpengaruh dalam pengelolaan keuangan yang semakin terarah. Tindakan petugas pemungut PBBP2 yang berlawanan dari aturan menunjukkan bahwa pengendalian diri mereka lemah, sehingga berdampak pada pengelolaan yang tidak terarah. Teori ini, menggambarkan seberapa besar tekanan sosial dari orang terdekat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Widiyanto dan Aprinhasari (2020) tekanan sosial berpengaruh terhadap individu dalam pengelolaannya. Adapun penelitian lainnya yang mendukung hipotesis riset ini, Baskara et al. (2022) norma subjektif berpengaruh positif terhadap tindakan pengelolaan individu. Norma subjektif individu paling mungkin ditimbulkan dari dorongan orang disekitarnya, seperti keluarga, teman, maupun atasan (Rokhayati dkk., 2022).

4.7.2 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kedua (H_2) ditunjukkan dalam Tabel 4.9, Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan melihat nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Pengaruh yang dilihat oleh koefisien regresi merupakan positif signifikan, artinya semakin tinggi Pengawasan maka akan meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (H_2 diterima).

Terry (2005) pengawasan adalah proses yang memberikan jaminan pencapaian tujuan yang diharapkan organisasi. Pengawasan memiliki peran penting dalam menjamin kualitas pengelolaan PBBP2 karena selama penyelenggaraannya, SDM yang rendah sangat mungkin bertindak. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memperkecil potensi *fraud* pemungut pajak PBBP2. Masalah pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih rendah. Rendahnya SDM ini berdampak luar biasa terhadap kualitas pengelolaan PBBP2, sehingga berujung pada penerimaan PAD yang tidak optimal. Faktanya, pelanggaran ini terjadi berkelanjutan di Kabupaten Situbondo, salah satunya dengan perilaku mereka tidak menyetorkan hasil penagihan ke pemerintah daerah untuk keuntungan pribadi. *Fraud* ini jika terus berlanjut tanpa perbaikan, maka kualitas pengelolaan PBBP2 tidak akan berkembang ke arah yang lebih baik.

Hasil riset ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Karimah (2018) pengawasan mempunyai pengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan, Farina *et al.* (2023) menyebutkan pengawasan berpengaruh signifikan serta positif terhadap pengelolaan keuangan. Riyan (2019) menyimpulkan adanya pengawasan diharapkan memperkecil kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemungut pajak yang berpikir akan melanggar aturan dengan tindakan tidak patut yang dapat merugikan daerah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Norma Subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2). Ini mendukung hipotesis 1 yang dibangun oleh peneliti. Hal ini disebabkan pemungut PBBP2 sepanjang menjalankan tugas pasti akan dihadapkan pada benturan kepentingan bisa dari rekan kerja, keluarga dan atasan yang paling sering terjadi, sehingga dampaknya risiko daerah mengalami kerugian terlalu besar serta menghambat daerah untuk berkembang.
2. Pengawasan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2). Ini mendukung hipotesis 2 yang disusun oleh peneliti. Di Kabupaten Situbondo, pengawasan secara rutin khusus pajak dan retribusi daerah, sebagaimana dapat dilihat dari PKPT yang disusun oleh Inspektorat Daerah. Akibatnya, oknum – oknum pemungut bisa bertindak melawan hukum dengan bebas, sebab fungsi pengawasan tidak berjalan dan sanksi tidak diterapkan secara tegas.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dijabarkan, implikasi yang dapat peneliti sampaikan, adalah:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi untuk menambah literatur serta memberikan bukti bahwa seluruh variabel penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya. Riset ini membuktikan jika norma subjektif dan pengawasan berpengaruh positif serta juga signifikan terhadap kualitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Namun, tidak

menutup kemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan, hingga perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti selanjutnya.

2. Implikasi Praktis

- a. Bagi Pemungut PBBP2, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi didalam penugasan, sehingga kedepannya diambil langkah perbaikan guna meningkatkan pemungutan pajak yang lebih profesional;
- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo, penelitian ini dapat digunakan untuk mempertegas urgensi fungsi pengawasan khusus pengelolaan pajak bumi dan bangunan, sehingga kedepannya dapat melibatkan Inspektorat Daerah secara rutin, melalui pemeriksaan/audit yang mempunyai daya ungkit tinggi bagi perubahan pengelolaan PBBP2 lebih berkualitas;
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna menegaskan kebijakan yang telah dibuat, melalui media – media massa sebelum dan sesudah periode pembayaran pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun dengan demikian masih memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Peran ganda Petugas pemungut PBBP2 juga selaku perangkat desa membuat proses penyebaran kuisioner membutuhkan waktu yang lebih lama;
2. Keterbatasan waktu dan sarana prasarana yang dimiliki oleh peneliti membuat pengumpulan keterangan dari responden, melalui wawancara tidak dapat dilakukan *face to face*.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo agar bisa memperbaharui data subyek pajak guna mengetahui besar potensi daerah yang sebenarnya belum digali;
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyebarkan kuesioner disaat yang tepat untuk menghindari waktu pengumpulan data yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., & Dwiningwarni, S. S. 2023. Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. *Nusantara Hasana Journal*. 3(2): 280 – 286.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50: 179 – 210.
- Aji, M., dan Vinandha, V. 2021. Alasan Mengapa Keuangan Negara Perlu Dikelola dengan Baik. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/13737/Alasan-Mengapa-Keuangan-Negara-Perlu-Dikelola-dengan-Baik.html#:~:text=Untuk%20menyelesaikan%20masalah%20kemiskinan%2C%20diperlukan,dialokasikan%20untuk%20menyelesaikan%20masalah%20kemiskinan>. [Diakses pada 28 Juli 2023].
- Alfarizi, S., dan Juniarti. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Repository STEI Indonesia Jakarta*. 1(1): 1 – 24.
- Aprinthsari, M., N., dan Widiyanto. 2020. Pengaruh Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. *Business and Accounting Education Journal*. 1(1): 65 – 72.
- Ariani, N. W. P., Abiyoga, N. L. A., dan Saputra, G. A. 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan, *Handling Complaint*, dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Manajemen, Kewirausahaan, dan Pariwisata*. 1(4): 1170 – 1178.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 2015. Paradigma Baru Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/196>. [Diakses pada 29 Juli 2023].
- Baskara, R. I., dan Sumardi, A. 2022. Peran *Communication Transparency, Trust, Attitude, Subjective Norms* dan *Perceived Behavioral Control* Terhadap *Money Management Intention*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. 2(2): 599 – 610.
- Cahyani, R., G. 2023. Dampak Pemahaman Literasi Keuangan dan *Locus of Control* pada Ibu Rumah Tangga dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Fenomologi pada Kelompok Ibu – ibu Dasawisma Kelurahan Cakung Barat). *Skripsi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Chandrarini, G. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Farina, L., Ekananda, M., dan Fatimah, F. 2023. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan

- Keuangan yang Dimediasi Komitmen Organisasi. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*. 9(3): 308 – 315.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goetsch, D., L., dan Davis, S. 1994. *In-troduction to Total Quality: Quality, Productivity, Competitiveness*. New York: Macmillian College Publishing Co.
- Hafizrianda, Y., Riani, I. A. P., dan Kekry, P. N. 2019. Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*. 4(3): 92 – 113.
- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Gava Media.
- Harsoyo, R. 2021. Model Pengembangan Mutu Pendidikan (Tinjauan Konsep Mutu Kaoru Ishikawa). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*. 2(1): 95 – 112.
- Jogiyanto, H. M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI.
- Jumroh, dan Pratama, Y. J. 2021. *Administrasi Perpajakan Daerah*. Bogor: In Media.
- Kamila, G. A., Azib, dan Setiyawan, S. 2021. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan *Financial Literacy* Terhadap *Financial Management Behavior* pada Mahasiswa. *Prosiding Manajemen*. 7(1). Februari 2021. SPESIA: 239 – 243.
- Karimah, S. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung). *Skripsi*. Bandung: Program Studi Akuntansi Universitas Telkom.
- Karmanata, A. A. G. R., dan Setiawan, P. E. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Tabanan. *Jurnal E-Akuntansi*. 29(3): 958 – 971.
- Kementerian Keuangan. 2021. Standar Indikator Kinerja Administrasi Pajak Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan
- Khasanah, A. 2020. Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

- Khusniyati, A. 2018. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi untuk Melakukan Pengungkapan Kecurangan. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Meliana, O. K. 2022. *Potraying Employee's Intrapreneurial Behaviour In A Banking Office In Semarang*. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Mulia, N., A., C., dan Rochmoeljati, Rr. 2021. Pengendalian Kualitas Pengelasan Menggunakan Metode *Statistical Quality Control (SQC)* dan *Failure Mode Effect Analysis (FMEA)* Di PT. PAL Indonesia. *Jurnal Manajemen Industri dan Teknologi*. 2(6): 60 – 71.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riswati, R. 2022. Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*. 9(1): 12 – 22.
- Riyan, 2019. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bekasi. 2019. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Rizqi, I. 2018. *Self Assessment* Sistem sebagai Dasar Pengutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*. 11(2): 81 – 88.
- Rokhayati, I., Hastuti, H., Purnomo, S. D., dan Alam, C. S. 2022. Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 11(03): 803 – 813.
- Rusnan, Koynja, J. J., dan Nurbani, E. S. 2020. Implikasi Penerapan Asas *Self Assessment* Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 5(1): 16 – 30.
- Satori, D., dan Komariah, A. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 8. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, A., S. 2021. Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *Laporan Akhir*. Sumatera Utara: Program Studi Keuangan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sodiqin, A. 2023. Ditarget Rp 10 miliar, Realisasi Pajak PBB-P2 di Situbondo Baru Tercapai 52 Persen. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/752965380/ditarget-rp-10-miliar-realisasi-pajak-pbb-p2-di-situbondo-baru-tercapai-52-persen>. [Diakses pada 20 Mei 2024].
- Sondang, P. Siagian. 2005. *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sondole, E. M. R., Nelwan, O. S., dan Palandeng, I. D. 2015. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.

- Pertamina (PERSERO) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung. *Jurnal EMBA*. 3(3): 608 – 743.
- Suawa, P., J., Pioh, N., R., dan Waworundeng, W. 2021. Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*. 1(2): 1 – 10.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyanto, Haryoko, dan Ugeng B. 2020. *Manajemen Pemasaran*. Serang: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafnidawaty. 2020. *Metode Simple Additive Weighting*. Banten: Universitas Raharja.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. 5 Januari 2022. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 KUESIONER

IDENTITAS PENELITI	
Nama	: Mikaila Khalisha Dadiarto
Nim	: 200820301008
Program Studi	: S2 Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Jember

Profil Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : 21-30 Tahun 31-40 Tahun
 41-50 Tahun >50 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : D3 D4/S1 S2 S3

Kategori Penilaian

- (STS) Sangat Tidak Setuju = 1
- (TS) Tidak Setuju = 2
- (N) Netral = 3
- (S) Setuju = 4
- (SS) Sangat Setuju = 5

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

A. Norma Subjektif (X₁)

No	Pertanyaan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Teman mendorong saya menyelesaikan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku					
2.	Keluarga memberikan motivasi supaya bersikap jujur dan amanah saat menjalankan tugas					
3.	Para pimpinan menjadi tauladan saya saat menunaikan kewajiban sebagai pemungut pajak					

B. Pengawasan (X₂)

No	Pertanyaan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Terdapat pengawasan secara rutin oleh Inspektorat Daerah terkait pelaksanaan pemungutan PBBP2					
2.	Inspektorat Daerah dan Bapenda memberikan pembinaan sebelum pelaksanaan pemungutan PBBP2					
3.	Inspektorat Daerah dan Bapenda memberikan pembinaan setelah pelaksanaan pemungutan PBBP2					
4.	Inspektorat Daerah dan Bapenda memberikan evaluasi terkait pelaksanaan PBBP2					
5.	Realisasi PBBP2 tercapai sesuai target yang ditetapkan					

C. Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (X₂)

No	Pertanyaan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Perencanaan target yang ditetapkan sudah sesuai dengan jumlah Wajib					

	Pajak PBBP2					
2.	Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan terkait dengan petunjuk teknis pemungutan PBBP2					
3.	Pelaksanaan pemungutan telah didukung oleh pemutakhiran data yang valid					
4.	Pelaporan PBBP2 dilakukan tepat waktu, transparan dan akuntabel					
5.	Pembayaran PBBP2 terutang dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan					
6.	Pemeriksaan dilakukan dengan memvalidasi dan memverifikasi riil di lapangan terhadap bukti dan daftar tunggakan pajak					
7.	Penagihan dilakukan sesuai dengan nominal yang terhutang didalam SPPT PBBP2					
8.	Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Pajak terbaru aktif dilakukan oleh petugas pemungut PBBP2					
9.	Sistem informasi Bapenda mudah diakses oleh petugas pemungut PBBP2/Wajib Pajak					
10.	Petugas pemungut PBBP2 mendapatkan pelatihan yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas					
11.	Petugas pemungut PBBP2 telah ditetapkan resmi melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah					
12.	Portal pengaduan pelanggaran tersedia dan mudah diakses					
13.	Publikasi penyeteroran hasil pungutan PBBP2 telah dilakukan secara transparan					

Lampiran 2 Rekapitulasi Kuisisioner

No	Norma Subjektif				Pengawasan						Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan													
	1	2	3	X1	1	2	3	4	5	X2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Y
1	4	4	2	10	3	4	4	4	3	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
2	4	4	4	12	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
3	4	4	4	12	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	55
4	2	2	4	8	2	2	3	4	4	15	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
5	4	2	4	10	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	53
6	4	2	4	10	4	2	4	4	2	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	49
7	3	3	4	10	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	57
8	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	54
9	2	2	3	7	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
10	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	5	5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	4	4	56
11	4	2	4	10	4	4	4	4	4	20	5	4	4	5	5	2	4	5	5	5	5	3	4	56
12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	3	3	3	53
13	4	4	4	12	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
14	4	4	4	12	2	4	4	4	4	18	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
15	4	4	4	12	5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	57
16	4	4	4	12	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	51
17	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
18	4	3	3	10	4	3	2	2	3	14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	56
19	2	4	4	10	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	51
20	5	5	5	15	4	4	4	2	4	18	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	58
21	5	5	5	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	53
22	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	54
23	4	4	4	12	5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	60
24	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	55
25	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	54
26	4	4	4	12	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	55
27	4	4	4	12	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	5	5	53
28	4	4	4	12	4	4	2	4	4	18	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	5	5	54
29	3	4	4	11	4	4	5	5	5	23	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	55
30	5	4	5	14	5	5	4	5	4	23	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	57
31	4	4	4	12	4	4	4	5	5	22	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	56
32	3	4	4	11	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	53
33	4	3	4	11	3	3	4	4	4	18	3	4	3	5	4	3	3	3	4	3	4	5	5	49
34	5	5	4	14	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	5	5	54
35	3	3	3	9	2	2	3	3	4	14	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	5	5	4	41
36	5	5	4	14	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	57
37	5	5	4	14	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4	5	5	54

No	Norma Subjektif				Pengawasan							Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan												
	1	2	3	X1	1	2	3	4	5	X2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Y
38	5	5	4	14	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	5	5	52
39	5	5	4	14	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	4	5	53
40	5	5	2	12	4	4	4	4	5	21	3	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	5	49
41	5	5	4	14	4	4	4	4	5	21	3	4	4	4	4	5	4	4	4	2	5	4	5	52
42	4	5	2	11	4	4	3	5	4	20	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	5	4	4	55
43	4	3	4	11	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	49
44	5	3	5	13	4	4	5	5	5	23	3	5	4	5	5	3	4	4	5	3	3	4	4	52
45	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	51
46	5	4	2	11	4	4	3	4	5	20	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	51
47	4	4	2	10	4	4	5	4	5	22	4	4	4	5	4	4	5	4	2	3	3	3	5	50
48	4	4	4	12	3	3	4	4	4	18	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	50
49	5	4	5	14	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	55
50	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	5	50
51	5	4	4	13	2	4	2	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	52
52	5	4	4	13	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	53
53	4	4	4	12	2	4	2	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
54	4	4	4	12	3	3	3	4	4	17	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
55	5	5	4	14	2	4	3	4	4	17	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	50
56	5	4	4	13	4	4	2	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
57	5	5	5	15	2	2	5	4	4	17	5	4	2	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	55
58	5	5	5	15	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	62
59	5	4	5	14	5	4	5	4	5	23	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	54
60	4	4	4	12	4	2	2	5	4	17	4	5	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	52
61	3	3	3	9	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42
62	4	3	3	10	4	3	3	3	4	17	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	44
63	4	4	4	12	4	2	2	4	4	16	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
64	4	4	4	12	4	4	4	5	4	21	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	51
65	4	5	5	14	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
66	4	4	4	12	4	4	4	2	4	18	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3	45
67	3	4	3	10	4	4	4	3	4	19	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	2	2	2	42
68	5	4	4	13	4	5	5	2	2	18	5	2	5	4	2	4	2	5	4	5	4	4	4	50
69	5	4	5	14	4	4	4	3	3	18	4	3	4	5	3	4	3	4	5	4	4	4	4	51
70	5	4	5	14	3	4	3	5	4	19	3	5	4	5	5	4	4	3	5	3	4	4	4	53
71	4	5	4	13	5	4	4	2	2	17	4	2	4	4	2	5	2	4	4	4	4	4	4	47
72	5	4	4	13	5	4	5	3	3	20	5	3	4	4	3	4	3	5	2	5	4	4	4	50
73	3	4	5	12	5	4	5	2	2	18	4	2	4	5	2	4	2	4	5	4	4	4	4	48
74	3	3	4	10	4	5	4	3	3	19	4	3	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	49
75	3	5	5	13	5	4	4	3	3	19	4	3	4	5	3	5	3	4	5	4	4	4	4	52
76	5	3	5	13	3	4	5	3	3	18	5	3	4	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	56

No	Norma Subjektif				Pengawasan							Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan													
	1	2	3	X1	1	2	3	4	5	X2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Y	
77	4	3	3	10	3	3	4	4	3	17	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	47
78	4	5	3	12	3	5	5	4	5	22	4	4	5	3	4	5	5	4	3	4	4	5	5	55	
79	3	4	3	10	5	3	5	3	4	20	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	5	5	47	
80	3	3	4	10	3	3	4	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	44	
81	3	4	3	10	3	4	3	3	4	17	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	2	4	5	45	
82	3	5	3	11	3	5	3	3	5	19	3	3	5	3	3	5	5	3	3	4	4	5	5	51	
83	4	3	3	10	4	3	3	4	3	17	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	5	5	49	
84	4	4	3	11	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	53	

Lampiran 3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	84	7.00	15.00	11.9048	1.65463
X2	84	14.00	25.00	19.2976	2.35817
Y	84	41.00	65.00	51.8810	4.14032
Valid N (listwise)	84				

Lampiran 4 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

		Correlations			
		X1.1	X1.2	X1.3	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.426**	.286**	.797**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.000
	N	84	84	84	84
X1.2	Pearson Correlation	.426**	1	.113	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000		.306	.000
	N	84	84	84	84
X1.3	Pearson Correlation	.286**	.113	1	.637**
	Sig. (2-tailed)	.008	.306		.000
	N	84	84	84	84
X1	Pearson Correlation	.797**	.722**	.637**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	84	84	84	84

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.375**	.370**	.003	.021	.577**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.979	.852	.000
	N	84	84	84	84	84	84
X2.2	Pearson Correlation	.375**	1	.379**	.098	.262*	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.375	.016	.000
	N	84	84	84	84	84	84
X2.3	Pearson Correlation	.370**	.379**	1	.048	.097	.631**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.663	.381	.000
	N	84	84	84	84	84	84
X2.4	Pearson Correlation	.003	.098	.048	1	.581**	.559**
	Sig. (2-tailed)	.979	.375	.663		.000	.000
	N	84	84	84	84	84	84
X2.5	Pearson Correlation	.021	.262*	.097	.581**	1	.632**
	Sig. (2-tailed)	.852	.016	.381	.000		.000
	N	84	84	84	84	84	84
X2	Pearson Correlation	.577**	.677**	.631**	.559**	.632**	1

Y.1 2	Pearson	.065	.006	-.071	-.114	.009	.018	-.099	-.198	.032	-.087	.480*	1	.665*	.326*
	Correlation											*		*	*
	n														
	Sig. (2-tailed)	.554	.959	.521	.301	.932	.873	.370	.072	.775	.432	.000		.000	.003
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.1 3	Pearson	-.066	.022	.024	-.014	.006	-.044	.018	-.135	-.168	-.289*	.665*	1	.254*	
	Correlation										.292*	*	*		
	n										*				
	Sig. (2-tailed)	.551	.842	.829	.903	.960	.692	.874	.221	.126	.007	.008	.000	.020	
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
Y	Pearson	.576*	.611*	.456*	.519*	.616*	.386*	.537*	.618*	.465*	.371*	.403*	.326*	.254*	1
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	n														
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.003	.020	
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	4

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	6

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	14

Lampiran 5 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	.428	.414	3.16900

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	609.364	2	304.682	30.339	.000 ^b
	Residual	813.445	81	10.043		
	Total	1422.810	83			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.704	3.252		8.212	.000
	X1	.795	.227	.318	3.495	.001
	X2	.815	.160	.464	5.105	.000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.13058204
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.052
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	26.704	3.252			8.212	.000		
X1	.795	.227	.318		3.495	.001	.855	1.170
X2	.815	.160	.464		5.105	.000	.855	1.170

a. Dependent Variable: Y

c. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.201	1.998		2.603	.011
	X1	-.157	.140	-.133	-1.122	.265
	X2	-.047	.098	-.056	-.476	.636

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7 Uji Hipotesis

a. Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	26.704	3.252		8.212	.000
	X1	.795	.227	.318	3.495	.001
	X2	.815	.160	.464	5.105	.000

a. Dependent Variable: Y

b. Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	609.364	2	304.682	30.339	.000 ^b
	Residual	813.445	81	10.043		
	Total	1422.810	83			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

c. Uji Koefisienan Determinasi

		Model Summary ^b		
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	.428	.414	3.16900

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 8 R_{tabel}

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	84	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 9 Rekap Kuisisioner

No	Norma Subjektif			
	1	2	3	X1
1	4	4	2	10
2	4	4	4	12
3	4	4	4	12
4	2	2	4	8
5	4	2	4	10
6	4	2	4	10
7	3	3	4	10
8	4	4	4	12
9	2	2	3	7
10	4	4	4	12
11	4	2	4	10
12	4	4	4	12
13	4	4	4	12
14	4	4	4	12
15	4	4	4	12
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	4	3	3	10
19	2	4	4	10
20	5	5	5	15
21	5	5	5	15
22	4	4	4	12
23	4	4	4	12
24	4	4	4	12
25	4	4	4	12
26	4	4	4	12
27	4	4	4	12
28	4	4	4	12
29	3	4	4	11
30	5	4	5	14
31	4	4	4	12
32	3	4	4	11
33	4	3	4	11
34	5	5	4	14
35	3	3	3	9
36	5	5	4	14
37	5	5	4	14
38	5	5	4	14
39	5	5	4	14
40	5	5	2	12
41	5	5	4	14

No	Norma Subjektif			
	1	2	3	X1
42	4	5	2	11
43	4	3	4	11
44	5	3	5	13
45	4	4	4	12
46	5	4	2	11
47	4	4	2	10
48	4	4	4	12
49	5	4	5	14
50	4	4	4	12
51	5	4	4	13
52	5	4	4	13
53	4	4	4	12
54	4	4	4	12
55	5	5	4	14
56	5	4	4	13
57	5	5	5	15
58	5	5	5	15
59	5	4	5	14
60	4	4	4	12
61	3	3	3	9
62	4	3	3	10
63	4	4	4	12
64	4	4	4	12
65	4	5	5	14
66	4	4	4	12
67	3	4	3	10
68	5	4	4	13
69	5	4	5	14
70	5	4	5	14
71	4	5	4	13
72	5	4	4	13
73	3	4	5	12
74	3	3	4	10
75	3	5	5	13
76	5	3	5	13
77	4	3	3	10
78	4	5	3	12
79	3	4	3	10
80	3	3	4	10
81	3	4	3	10
82	3	5	3	11
83	4	3	3	10
84	4	4	3	11

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Y
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	55
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	53
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	49
4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	57
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	54
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
5	5	4	5	5	2	5	5	5	5	4	4	2	56
5	4	4	5	5	2	4	5	5	5	3	4	5	56
4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	3	3	3	53
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	57
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	51
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	51
4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	58
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	53
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	54
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	55
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	54
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	55
4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	5	5	53
4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	5	5	54
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	55
4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	57
4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	53
3	4	3	5	4	3	3	3	4	3	4	5	5	49
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	5	5	54
3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	5	5	4	41
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	57
5	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4	5	5	54
5	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	5	5	52
5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	4	5	53
3	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	5	49
3	4	4	4	4	5	4	4	4	2	5	4	5	52

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Y
5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	5	4	4	55
3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	49
3	5	4	5	5	3	4	4	5	3	3	4	4	52
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	51
3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	51
4	4	4	5	4	4	5	4	2	3	3	3	5	50
4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	50
4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	55
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	52
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	53
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	49
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
5	4	2	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	55
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	62
4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	54
4	5	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	52
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42
3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	44
4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	51
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3	45
4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	2	2	2	42
5	2	5	4	2	4	2	5	4	5	4	4	4	50
4	3	4	5	3	4	3	4	5	4	4	4	4	51
3	5	4	5	5	4	4	3	5	3	4	4	4	53
4	2	4	4	2	5	2	4	4	4	4	4	4	47
5	3	4	4	3	4	3	5	2	5	4	4	4	50
4	2	4	5	2	4	2	4	5	4	4	4	4	48
4	3	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	49
4	3	4	5	3	5	3	4	5	4	4	4	4	52
5	3	4	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	56
4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	47
4	4	5	3	4	5	5	4	3	4	4	5	5	55
3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	5	5	47
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	44
3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	2	4	5	45
3	3	5	3	3	5	5	3	3	4	4	5	5	51
4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	5	5	49
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	53